

## **SOSIAL DAN EKONOMI NELAYAN GURITA BERDASARKAN INDIKATOR EAFM DI KABUPATEN BANGGAI LAUT**

### ***SOCIAL AND ECONOMY OCTOPUS FISHERIES WITH EAFM INDICATOR IN BANGGAI LAUT REGENCY***

**Daniel Julianto Tarigan<sup>1\*</sup>, Domu Simbolon<sup>2</sup>, dan Budy Wiryawan<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Pendidikan Kelautan dan Perikanan, Universitas Pendidikan Indonesia, Jl. Dr. Setiabudi No.229,  
Sukasari, Bandung, Jawa Barat 40154

<sup>2</sup>Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, FPIK-IPB, Jl. Raya Dramaga, Babakan, Dramaga,  
Bogor, 16680

\*Corresponding author: danieljulianto@upi.edu

#### **ABSTRACT**

*Banggai Laut Regency is one of the regencies in Central Sulawesi that contributes a lot of octopus catches. The price of octopus in Banggai Laut Regency is quite high. But octopus fishermen are still living within limitations. On the other hand, Banggai Laut Regency fishermen are small scale fishermen who are closely related to social conflicts in fisheries. This study aims to determine the social and economic level of octopus fishermen in Banggai Laut Regency. Fisheries social and economic data are obtained through surveys, in-depth interviews and questionnaires. The social and economic conditions of octopus fishermen were analyzed using the Ecosystem Approach Fisheries Management (EAFM) approach. The analysis shows the level of sustainability domain / social aspects have a good level of sustainability and domain / economic aspects have a very good level of sustainability. Overall aspects / social and economic aspects of octopus fisheries in Banggai Laut Regency are classified as very good with the acquisition of a value of 91.*

**Keywords:** *Banggai Laut Regency, economy, EAFM, octopus, social*

#### **ABSTRAK**

Kabupaten banggai laut merupakan salah satu kabupaten di sulawesi tengah yang menyumbang banyak hasil tangkapan gurita. Harga gurita di kabupaten banggai laut cukup tinggi. Namun nelayan gurita masih hidup dalam keterbatasan. Disisi lain, nelayan kabupaten banggai laut merupakan nelayan skala kecil yang erat dengan adanya konflik sosial perikanan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan tingkat sosial dan ekonomi nelayan gurita kabupaten banggai laut. Data sosial dan ekonomi perikanan diperoleh melalui survey, wawancara yang mendalam dan kuesioner. Kondisi sosial dan ekonomi nelayan gurita dianalisis dengan menggunakan pendekatan *ecosystem approach fisheries management (eafm)*. Hasil analisis menunjukkan tingkat keberlanjutan domain/aspek sosial memiliki tingkat keberlanjutan yang baik dan domain/aspek ekonomi memiliki tingkat keberlanjutan sangat baik. Secara keseluruhan aspek/domain sosial dan ekonomi perikanan gurita di kabupaten banggai laut tergolong sangat baik dengan perolehan nilai 91.

**Kata kunci:** ekonomi, eafm, gurita, kabupaten banggai laut, sosial

#### **PENDAHULUAN**

Gurita merupakan produk perikanan yang bernilai ekonomis tinggi. Produk perikanan gurita diekspor ke berbagai negara di dunia dari Afrika (Moroko, Senegal, Tunisia dan Mauritania), Eropa (Italia, Portugal, Yunani, Prancis dan Spanyol) hingga Amerika (Mexico, Brazil, Peru, Venezuela, dan Chile). Negara terbesar dengan produksi gurita di Asia pada tahun 2010 yaitu China 125.776 ton, Jepang 41.700 ton, Korea 20.759 ton, Indonesia, Thailand 10.315 ton, Filipina 5.506 ton, dan Malaysia 1.936 ton. Indonesia berada di urutan keempat sebagai negara dengan produksi terbanyak dengan produksi mencapai 10.860 ton (FAO, 2014). Hal ini membuktikan bahwa Indonesia merupakan salah satu yang memiliki cukup melimpah sumberdaya gurita di Asia.

Kabupaten Banggai Laut merupakan salah satu kabupaten yang menyumbang banyak hasil tangkapan gurita di Indonesia. Potensi perikanan gurita di Kabupaten Banggai Laut mencapai 10.652 ton/tahun dengan produksi gurita mencapai 8.034 ton/tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sumberdaya gurita mencapai 75% (DKP Banggai Laut, 2016). Pemanfaatan gurita yang banyak hanya dihasilkan sebagai data semata, karena informasi tentang gurita masih terbatas. Hal ini diduga karena gurita belum dapat dimanfaatkan secara komersial untuk bahan makanan di dalam negeri. Selain itu terkait harga gurita yang masih cukup tinggi di Indonesia.

Harga gurita di Kabupaten Banggai Laut juga cukup tinggi. Menurut Tarigan *et al.* 2018, harga jual gurita berkisar Rp. 52.000/kg. Hal ini membuktikan bahwa harga jual gurita sangat berpengaruh terhadap sumber pendapatan nelayan. Harga yang tinggi sudah seharusnya menaikkan taraf hidup nelayan gurita Kabupaten Banggai Laut. Namun dalam pengamatan, nelayan gurita masih hidup dalam keterbatasan.

Nelayan gurita Kabupaten Banggai Laut termasuk kategori nelayan skala kecil atau *small scale fisheries*. Hal ini dikarenakan nelayan menangkap gurita dengan menggunakan kapal dan alat tangkap yang sederhana (Tarigan *et al.*, 2018). Menurut Salas *et al.*, 2004, nelayan skala kecil dicirikan dengan berbagai keterbatasan diantaranya adalah keterbatasan waktu untuk melaut, jenis kapal atau alat tangkap yang digunakan. Selain itu nelayan skala kecil sangat erat berkaitan dengan konflik sosial perikanan. Salah satu konflik perikanan skala kecil terkait dengan pemanfaatan daerah penangkapan dan penggunaan alat tangkap yang bersifat destruktif atau merusak.

Pengelolaan terkait kondisi sosial dan ekonomi dibutuhkan oleh nelayan gurita. Pengelolaan perikanan gurita diduga masih belum optimal karena hanya mencari keuntungan semata tanpa memperhatikan kondisi sosial nelayan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu pengelolaan yang bertujuan untuk menentukan tingkat kondisi sosial dan ekonomi nelayan gurita. Salah satu pendekatan yang baik digunakan dalam menentukan tingkat sosial dan ekonomi yaitu *Ecosystem Approach to Fisheries Management* (EAFM).

EAFM adalah pendekatan pengelolaan dengan konsep bagaimana menyeimbangkan antara tujuan sosial, ekonomi dan kesehatan ekosistem perikanan secara terpadu, komprehensif dan berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut, maka pendekatan EAFM merupakan salah satu pengelolaan yang tepat untuk perikanan gurita. Penelitian dengan pendekatan EAFM sudah dilakukan di Banggai Laut terkait dengan pengelolaan sumberdaya perikanan Capungan Banggai (*Pterapogon kauderni*. Koumans 1933) dengan pendekatan ekosistem (studi kasus Pulau Banggai Kabupaten Banggai Laut) (Adel, 2017), evaluasi keberlanjutan perikanan gurita dengan indikator EAFM di Kabupaten Banggai Laut (Tarigan *et al.* 2019). Namun pengelolaan tentang perikanan gurita dalam kaitannya dengan sosial dan ekonomi di Indonesia masih sangat terbatas. Oleh karena itu penelitian tentang pengelolaan perikanan gurita perlu dilakukan. Penentuan indikator EAFM dilakukan dengan 6 domain meliputi sumber daya ikan, habitat dan ekosistem, teknik penangkapan ikan, ekonomi, sosial dan kelembagaan (KKP, 2014). Namun fokus penelitian ini hanya dilakukan terkait dengan sosial dan ekonomi nelayan gurita Kabupaten Banggai Laut.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian dilaksanakan pada bulan September dan Oktober 2017 di Desa Popisi, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah. Jenis data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer meliputi beberapa domain/aspek yaitu aspek sosial dan aspek ekonomi. Masing-masing domain/aspek memiliki indikator-indikator tersendiri yang digunakan untuk membantu penilaian tingkat keberlanjutan dari masing-masing aspek/domain.

Data ekonomi diperoleh melalui survey, wawancara yang mendalam dan kuesioner. Data yang terkait dengan domain/aspek wawancara meliputi rata-rata pendapatan harian nelayan (musim dan tidak musim) dan aset yang dimiliki. Data yang terkait dengan domain/aspek ekonomi meliputi rata-rata pendapatan harian nelayan (musim dan tidak musim) dan aset yang dimiliki. Data yang terkait dengan sosial meliputi konflik perikanan yang terjadi dan *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan. Data domain/aspek ekonomi dan sosial diperoleh melalui wawancara yang mendalam dan kuesioner. Wawancara dilakukan terhadap responden yang berkepentingan dalam pengelolaan gurita di Kabupaten Banggai Laut. Pihak yang berkepentingan meliputi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banggai Laut, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), nelayan, tokoh masyarakat, kepala desa, pengusaha perikanan dan LSM. Responden ditentukan menggunakan teknik *snowball sampling*. Wawancara dilakukan secara terstruktur menggunakan daftar pertanyaan (kuisisioner). Jumlah sampel yang pada penelitian ini adalah 30 responden, meliputi 20 nelayan, 5 pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banggai Laut, 3 pegawai Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan 2 pegawai Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Data sekunder diperoleh dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banggai Laut, penelitian sebelumnya, dan pihak pengelola setempat. Data yang dikumpulkan meliputi data produksi, data jumlah armada perikanan gurita, dan data pelanggaran (konflik perikanan).

Kondisi keberlanjutan perikanan gurita di Kabupaten Banggai Laut dianalisis menggunakan pendekatan berbasis *Ecosystem Approach Fisheries Management* (EAFM). Tahapan analisis dengan pendekatan EAFM mengacu pada KKP (2014), Budiarto (2015) dan Pregoni *et al.* (2015). Penilaian domain/aspek ekonomi meliputi 3 indikator. Indikator dalam domain/aspek ekonomi yaitu kepemilikan aset, pendapatan rumah tangga perikanan dan rasio tabungan. Kriteria penilaian dan bobot untuk masing-masing indikator disajikan pada Tabel 1. Pemberian bobot untuk masing-masing indikator berbeda-beda. Hal ini didasarkan pada tingkat kepentingan dari indikator-indikator yang ada Nilai tertinggi terdapat pada indikator kepemilikan aset (45). Jika nelayan memiliki aset yang bertambah maka kegiatan perikanan gurita mampu menambah tingkat layak hidup nelayan. Nilai terendah terdapat pada indikator rasio tabungan (25).

Indikator kepemilikan aset digunakan untuk melihat peningkatan nilai/jumlah aset rumah tangga. Penilaian dianalisis dengan melihat aset yang dimiliki oleh setiap rumah tangga nelayan dibandingkan tahun sebelumnya. Semakin bertambah aset rumah tangga nelayan maka kegiatan perikanan gurita layak untuk dilanjutkan.

Tabel 1. Kriteria penilaian indikator dalam domain/aspek ekonomi

Domain/Aspek Ekonomi					
No	Indikator	Kriteria	S	B	Nilai (SxB)
	Kepemilikan aset	Nilai aset berkurang (lebih dari 50%)	1	45	

	Nilai aset tetap (kurang dari 50%)	2	
	Nilai aset bertambah (di atas 50%)	3	
Pendapatan rumah tangga perikanan	<Rata-rata UMR	1	30
	=Rata-rata UMR	2	
	>Rata-rata UMR	3	
Rasio tabungan	Kurang dari bunga pinjaman	1	25
	Sama dengan bunga pinjaman	2	
	Lebih dari bunga pinjaman	3	

Ket: Hasil modifikasi, \*S= Skor, \*B= Bobot

Indikator pendapatan rumah tangga perikanan bertujuan untuk melihat pendapatan total nelayan yang dihasilkan dari operasi penangkapan gurita. Penilaian pendapatan dianalisis dengan menghitung selisih antara upah minimum regional (UMR) Sulawesi Tengah dengan pendapatan rumah tangga nelayan perbulan. Jika pendapatan rumah tangga lebih besar dibandingkan dengan UMR, maka kegiatan penangkapan gurita menguntungkan bagi nelayan.

Penilaian indikator rasio tabungan bertujuan untuk melihat tabungan nelayan gurita yang diperoleh dari kegiatan penangkapan gurita. Penilaian rasio tabungan dianalisis melalui perbandingan jumlah pendapatan yang didapat dibagi dengan pengeluaran nelayan. Jika rasio tabungan meningkat maka kegiatan penangkapan gurita layak untuk dilanjutkan.

Penilaian terhadap domain/aspek sosial meliputi 3 indikator. Indikator tersebut, yaitu partisipasi pemangku kepentingan, konflik perikanan dan pemanfaatan pengetahuan lokal dalam pengelolaan sumberdaya ikan. Kriteria penilaian dan bobot untuk masing-masing indikator disajikan pada Tabel 2. Pemberian bobot untuk masing-masing indikator berbeda-beda. Hal ini didasarkan pada tingkat kepentingan dari indikator-indikator yang ada. Nilai tertinggi terdapat pada indikator partisipasi pemangku kepentingan (40). Hal ini karena melibatkan seluruh pemangku kepentingan terhadap kehidupan sosial masyarakat khususnya nelayan. Nilai terendah terdapat pada indikator pemanfaatan pengetahuan lokal dalam pengelolaan sumberdaya ikan (10).

Tabel 2. Kriteria penilaian indikator dalam domain/aspek sosial

Domain/Aspek Sosial					
No	Indikator	Kriteria	S	B	Nilai (SxB)
	Partisipasi pemangku kepentingan	Kurang dari 50%	1	40	
		50-100%	2		
		=100%	3		
	Konflik perikanan	> 5 kali/tahun	1	35	
		2-5 kali/tahun	2		
		< 2 kali/tahun	3		
	Pemanfaatan pengetahuan lokal dalam pengelolaan sumberdaya ikan	Tidak ada pemanfaatan pengetahuan lokal	1	25	
		Ada namun tidak efektif	2		
		Ada pemanfaatan dan efektif digunakan	3		

Ket: Hasil modifikasi, \*S= Skor, \*B= Bobot.

Indikator partisipasi pemangku kepentingan digunakan untuk melihat tingkat partisipasi stakeholder di Kabupaten Banggai Laut. Penilaian partisipasi pemangku kepentingan dianalisis berdasarkan tingkat peran masing-masing stakeholder dalam pengelolaan perikanan. Bila peran masing-masing stakeholder sesuai dengan kepentingan yang ada, maka akan mempermudah dalam pengelolaan perikanan.

Indikator konflik perikanan bertujuan untuk melihat frekuensi terjadinya konflik. Konflik yang terjadi dianalisis dengan melihat penyebab konflik, kebijakan konflik, konflik alat tangkap dan dampak konflik terhadap kegiatan penangkapan gurita selama periode 1 tahun terakhir.

Indikator pemanfaatan pengetahuan lokal dalam pengelolaan sumberdaya ikan bertujuan untuk mengetahui implementasi pengetahuan lokal dalam pengelolaan sumberdaya perikanan. Penilaian dianalisis dengan mengetahui pemanfaatan pengetahuan dalam pengelolaan sumberdaya ikan kemudian disajikan secara deskriptif. Pengetahuan nelayan lokal dalam pemanfaatan sumberdaya ikan akan membantu kehidupan sosial nelayan lebih baik.

Kondisi keberlanjutan perikanan gurita di Kabupaten Banggai Laut dianalisis menggunakan pendekatan penilaian indikator *Ecosystem Approach Fisheries Management* (EAFM). Tahapan analisis dengan pendekatan EAFM mengacu pada KKP (2014), Budiarto *et al.* (2015) dan Pregiwati *et al.* (2015). Tahapan analisis dengan pendekatan EAFM adalah sebagai berikut KKP (2014), Budiarto *et al.* (2015) dan Pregiwati *et al.* (2015):

1. Menentukan kriteria untuk setiap indikator dari masing-masing domain/aspek yang terdapat di dalam EAFM (aspek sumber daya dan teknik penangkapan).
2. Menentukan batasan nilai (*reference point*) untuk masing-masing kriteria pada setiap indikator.
3. Menentukan bobot untuk setiap indikator. Pembobotan ditetapkan dalam skala 0-100. Indikator yang memiliki bobot besar dianggap memiliki nilai kepentingan paling tinggi dalam domain tersebut. Pembobotan maksimal tiap domain/aspek adalah 100 yang dibagi habis dalam setiap indikator.
4. Mengkaji keragaan masing-masing indikator yang diuji.
5. Menentukan nilai skor untuk setiap indikator dengan menggunakan skala Likert (berbasis ordinal 1 dan 3) sesuai dengan keragaan masing-masing indikator. Penentuan skor 1 dan 3 didasarkan pada data indikator EAFM yang telah dikumpulkan. Data dikumpulkan dengan mempertimbangkan sifat homogen yaitu alat tangkap pancing ulur dan Kabupaten Banggai Laut yang merupakan daerah yang masih dalam tahap perkembangan. Nilai skor digunakan untuk menunjukkan bagus atau jeleknya nilai suatu indikator. Nilai skor indikator dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Nilai skor indikator

<b>Skor Indikator</b>	<b>Deskripsi</b>
1	Jelek/rendah
2	Sedang
3	Baik

Sumber: KKP (2014), Budiarto *et al.* (2015) dan Pregiwati *et al.* (2015).

6. Menentukan nilai dari masing-masing indikator dengan formula:  

$$\text{Nilai Indikator} = \text{Bobot} \times \text{Nilai Skor} \dots \dots \dots (1)$$
7. Menentukan nilai dari masing-masing aspek/domain dengan mengakumulasikan nilai indikator yang didapat didalam setiap aspek.
8. Nilai dari masing-masing domain/aspek kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis komposit sederhana berbasis rata-rata aritmatik. Indeks komposit ini merupakan nilai konversi nilai total setiap aspek/domain EAFM. Proses konversi ini dilakukan untuk memperoleh batasan yang baku dari nilai EAFM. Nilai total dari perkalian komponen EAFM selanjutnya di konversi dalam skala 33-100. Konversi ini diperlukan untuk memudahkan pengkategorian suatu domain EAFM. Nilai skala setiap domain/aspek yaitu:  

$$Nk - i = \frac{Cat-i}{Cat-imax} \times 100 \dots \dots \dots (2)$$

**Keterangan:**  
 Cat = nilai total yang didapat dalam satu aspek/domain  
 Cat-imax = nilai maksimal dalam suatu aspek/domain yang diperoleh saat semua indikator memiliki skor 3.
9. Menentukan nilai komposit total dari seluruh domain/aspek EAFM yang dikaji. Nilai komposit ditentukan dari nilai rata-rata dari seluruh domain yang dikaji dalam wilayah EAFM. Hasil ini kemudian dikonversi menjadi nilai dengan skala 33-100. Nilai 100 termasuk paling tinggi dan paling baik kondisinya, dan nilai yang rendah tergolong paling buruk kondisinya. Nilai yang didapat kemudian dideskripsikan atas 5 kelompok atau kategori. Kelima kategori ini menggambarkan 5 tingkatan status pengelolaan perikanan suatu wilayah. Kategori nilai EAFM dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Batasan skor nilai EAFM

Rentang Nilai		Deskripsi
≥33. 33	≤46. 17	Buruk dalam menerapkan EAFM
≥46. 67	≤59. 5	Kurang dalam menerapkan EAFM
≥60	≤72. 83	Sedang dalam menerapkan EAFM
≥73. 33	≤86. 17	Baik dalam menerapkan EAFM
≥86,67	≤100	Sangat baik dalam menerapkan EAFM

Sumber: KKP (2014), Budiarto et al., (2015) dan Pregiwati et al., (2015).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Status Pengelolaan Perikanan Berdasarkan Domain Sosial

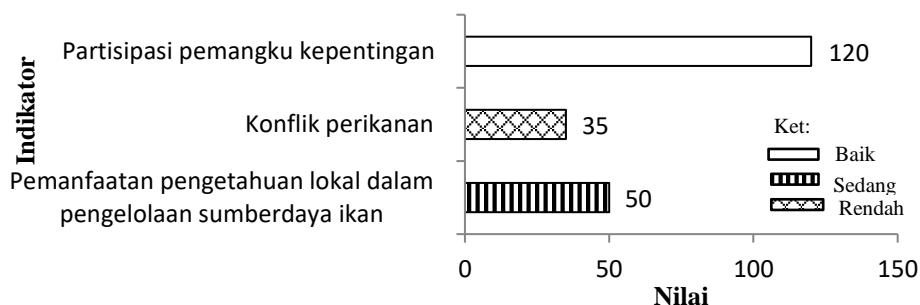
Nilai skor indikator partisipasi pemangku kepentingan adalah 120. Hal ini mengindikasikan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan yang ada di Banggai Laut sangat tinggi. Dari hasil wawancara dengan beberapa stakeholder yang ada di Kabupaten Banggai Laut diperoleh hasil bahwa partisipasi pemangku kepentingan yang ada di daerah Banggai Laut tergolong tinggi. Hal ini disebabkan karena seluruh pemangku kepentingan yang ada turut serta dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya gurita. Pemangku kepentingan yang dimaksud meliputi pihak Badan

Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, PSDKP, para pengusaha perikanan, nelayan, DKP Kabupaten Banggai Laut dan LSM.

Penilaian terhadap indikator konflik perikanan bernilai 35. Konflik yang terjadi lebih dari 5 kali/tahun. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak nya konflik yang terjadi di daerah Banggai Laut. Konflik tersebut disebabkan oleh nelayan luar Kabupaten Banggai Laut melakukan operasi penangkapan di daerah penangkapan Banggai Laut. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan selama penelitian ditemukan nelayan luar Banggai Laut menangkap di Perairan Banggai Laut untuk mencari gurita. Nelayan luar Banggai Laut melakukan penangkapan karena sudah menjadi kebiasaan dan tidak adanya pelarangan dari pemerintah setempat untuk menangkap di daerah penangkapan Banggai Laut.

Nilai skor indikator pemanfaatan pengetahuan lokal dalam pengelolaan sumberdaya ikan adalah lima puluh. Hasil ini menunjukkan bahwa adanya pemanfaatan pengetahuan lokal dalam pengelolaan sumberdaya ikan namun tidak berjalan efektif. Hasil wawancara terhadap nelayan, pengetahuan tentang penangkapan gurita dibawa oleh nelayan pendatang yang umumnya berasal dari Suku Bajo (Sulawesi Utara).

Dari segi aspek sosial diperoleh nilai 100 dengan kondisi sangat baik (Gambar 2). Namun indikator konflik perikanan termasuk kategori yang rendah dalam penilaian aspek sosial. Konflik perikanan yang terjadi terkait daerah penangkapan ikan. Nelayan non lokal yang menangkap gurita di Perairan Banggai Laut. Pemerintah dan para *stakeholder* harus mengatur zona daerah penangkapan nelayan Banggai Laut dengan nelayan luar Banggai Laut. Pengaturan zona penangkapan diperlukan demi keberlanjutan sumberdaya gurita. Selain itu, keberlanjutan domain/aspek sosial diperlukan indikator secara spesifik seperti usia nelayan, jumlah anggota keluarga yang terlibat dalam kegiatan penangkapan, umur keluarga, tingkat buta huruf nelayan (FAO, 2017).



Gambar 2. Perhitungan nilai komposit domain/aspek sosial

### Status Pengelolaan Perikanan Berdasarkan Domain Ekonomi

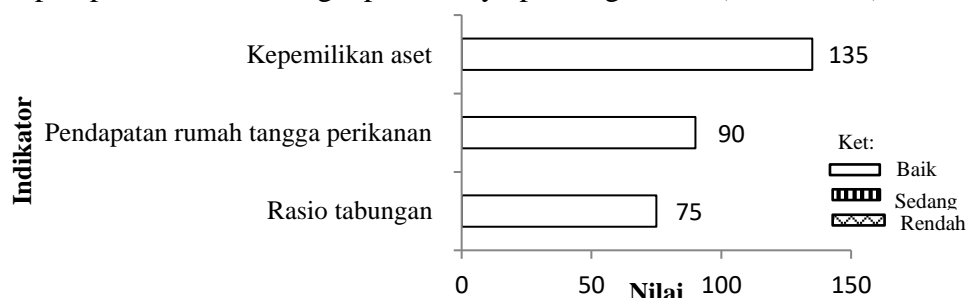
Nilai indikator kepemilikan aset yang diperoleh adalah 135 yang berarti nilai aset yang dimiliki nelayan bertambah dari usaha perikanan gurita. Dari hasil wawancara dan kuesioner terhadap beberapa nelayan pancing ulur gurita menyebutkan bahwa kegiatan penangkapan gurita meningkatkan jumlah aset mereka setiap tahunnya. Aset yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi tabungan, peralatan elektronik (tv, kulkas, mesin cuci, dll), HP, kendaraan motor, dan tanah.

Nilai indikator pendapatan rumah tangga perikanan adalah 90. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan nelayan pancing ulur di Kabupaten Banggai Laut memiliki penghasilan yang lebih atau sama dengan UMR Kabupaten Banggai Laut. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 56 Tahun 2015 tentang upah minimum

kota/kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah, UMK sebesar Rp 1.770.000,00. Berdasarkan hasil wawancara terhadap nelayan gurita Kabupaten Banggai Laut, pendapatan nelayan berkisar antara Rp. 1.500.000,00 hingga 3.000.000,00 per bulan. Hasil ini menunjukkan bahwa pendapatan nelayan sudah layak karena nilainya sudah melebihi UMK.

Nilai indikator rasio tabungan yang diperoleh adalah 75. Nilai tersebut menunjukkan bahwa rasio tabungan yang diperoleh dari kegiatan perikanan gurita lebih dari bunga kredit pinjaman. Dari hasil wawancara terhadap beberapa nelayan pancing ulur, pengeluaran rumah tangga nelayan di Kabupaten Banggai Laut rata-rata sebesar Rp. 1.500.000 hingga Rp. 2.000.000 per bulan untuk kebutuhan sehari-hari. Pendapatan nelayan yang didapatkan lebih dari kredit pinjaman. Rasio tabungan yang positif menyebabkan banyak nelayan memiliki kemampuan untuk menambah jumlah aset mereka, diantaranya untuk membeli alat tangkap yang baru, membeli peralatan rumah tangga dan elektronik, motor, investasi dan lain sebagainya.

Secara ekonomi, kegiatan perikanan gurita Banggai Laut sudah dapat memberikan penghasilan yang layak (diatas UMR yang sudah ditetapkan) untuk nelayan. Kondisi dari aspek ekonomi mendapatkan hasil yang sangat baik dengan nilai 100 (Gambar 3). Dengan penghasilan yang didapat, nelayan gurita mampu menambah kepemilikan asetnya. Kegiatan operasi penangkapan gurita yang dilakukan oleh unit perikanan pancing ulur di Banggai laut dinilai menguntungkan dan secara finansial layak untuk dilanjutkan. Indikator keberlanjutan kedepannya diharapkan lebih spesifik terhadap biaya operasional, seperti upah, biaya yang dikeluarkan untuk melaut (BBM), perbaikan kapal, perbaikan alat tangkap dan biaya peluang modal (FAO, 2017).



Gambar 3. Perhitungan nilai komposit domain/aspek ekonomi

### **Status Pengelolaan Sosial dan Ekonomi Perikanan Gurita**

Secara keseluruhan tingkat keberlanjutan perikanan gurita di Kabupaten Banggai Laut diperoleh hasil sangat baik dengan nilai 87.29 (Tabel 5). Kategori sedang masih ditemukan di dalam aspek/domain EAFM di Kabupaten Banggai Laut. Hal ini menjadi perhatian dan tugas *stakeholder* demi keberlanjutan sumberdaya perikanan gurita di Kabupaten Banggai Laut. Pengelolaan berkelanjutan dilakukan dengan memberikan prioritas pada domain/aspek paling berpengaruh untuk memperbaiki status keberlanjutan (Sala *et al.* 2017).



Tabel 5. Nilai setiap domain/aspek EAFM di Kabupaten Banggai Laut

<b>Domain/aspek</b>	<b>Nilai Domain</b>	<b>Keterangan</b>
Sosial	82	Baik
Ekonomi	100	Sangat baik
Rata-rata agregat	91	Sangat baik

## **KESIMPULAN**

Tingkat keberlanjutan sosial dan ekonomi perikanan gurita di Kabupaten Banggai Laut tergolong sangat baik dengan perolehan nilai 91. Domain/aspek sosial memiliki tingkat keberlanjutan yang baik dan domain/aspek ekonomi memiliki tingkat keberlanjutan sangat baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adel Y, Yovitner, Rahardjo, MF. 2016. Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Banggai Cardinalfish (*Pterapogon kauderni*, Koumans 1933) Dengan Pendekatan Ekosistem (Studi Kasus Pulau Banggai Kabupaten Banggai Laut). *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia (JIPI)*. Vol. 21 (3): 186-194.
- Budiarto, A. 2015. Pengelolaan Perikanan Rajungan dengan Pendekatan Ekosistem di Perairan Laut Jawa (WPPNRI 712). [thesis]. Bogor (ID): IPB.
- [DKP] Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banggai Laut. 2016. Profil Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banggai Laut 2016.
- [FAO] Food And Agriculture Organization. 2014. Cephalopods of the world. An annotated and illustrated catalogue of cephalopod species known to date. Volume 3. Octopods and Vampire Squids. Species Catalogue for Fishery Purposes. No. 4, Vol. 3. Rome, FAO. 2014. 370 p. 11 colour plates.
- [FAO] Food And Agriculture Organization. 2017. *Handbook for Fisheries Socio-economic Sample Survey*. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper. 118 p
- [KKP] Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2014. Indikator untuk pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem (Ecosystem Approach to Fisheries Management). Satker Pengelolaan dan Rehabilitasi Terumbu Karang – CTI. Jakarta.
- Pregiwati LA, Wiryawan B, Baskoro MS, Wisudo SH, Satria A. 2015. Linking indicators for ecosystem approach fisheries management and management of marine protected area effectiveness in Anambas Island, Indonesia. *Aquaculture, Aquarium, Conservation & Legislation International Journal of the Bioflux Society*. Vol 8 (6): 1048-1063.
- Sala R, Simbolon D, Wisudo SH, Haluan J, Yusfiandayani R. 2017. Multidimensional Analysis of Fisheries Sustainability In Traditional Use Zone Of Misool, Raja Ampat, Indonesia. *International Journal of Development Research* Vol. 07, pp.11822-11829.
- Salas S, Sumaila UR, Pitcher T. 2004. Shortterm Decision of Small-scale Fishers Selecting Alternative Target Species: a Choice Model. *Can .J. Fish. Aquat. Sci.* 61: 374-383.

- Tarigan DJ, Simbolon D, Wiryawan B. 2018. Strategi Pengelolaan Perikanan Gurita di Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan*. Vol 9 (1): 13-24.
- Tarigan DJ, Simbolon D, Wiryawan B. 2019. Evaluasi Keberlanjutan Perikanan Gurita dengan indikator EAFM (*Ecosystem Approach To Fisheries Management*) Di Kabupaten Banggai Laut. *Jurnal Marine Fisheries*. Vol 10 (1): 83-94.